

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah)

Latifah Sukmawati Yuniar¹, Arif Gunarsa², Faizal Asdar³, Galing Ralis⁴, Aulia Putri
Ramadhani⁵, Daud Ruranto Buntulabi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tadulako Palu

¹Latifahsukmawati90@gmail.com, ^{2,3,4,5,6}lpplamongan@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 23 November 2023

Disetujui : 27 November 2023

Dipublikasi : 1 April 2023

ABSTRACT

The existence of increasing demands for the implementation of public accountability has implications for management in government agencies to provide information to the public, one of which is information in financial reports. Government financial reports are an important component in realizing financial management accountability to the public. The function of information in financial reports will not have benefits if the presentation and delivery of financial information is not reliable. Reliability of financial report information is a manifestation of public financial management accountability and in accordance with Government Regulation Number 24 of 2005 is an element of important information value related to decision-making of various parties. This type of research is associative. This study aims to explain the influence of the quality of human resources, the use of information technology and regional financial supervision on the reliability of the presentation of regional financial reports in the OPD of the Central Sulawesi Provincial Government. Based on the results of data analysis that has been carried out to test the hypotheses put forward in this study, several conclusions can be drawn, including: The quality of human resources has a positive effect on the reliability of financial statement presentation accepted and supported by empirical evidence. Acceptance or proof of the first hypothesis simultaneously answers the first research question. Utilization of information technology has a positive effect on the reliability of presentation of acceptable financial statements. Accepting or proving this second hypothesis, this also answers the second research question. Regional financial supervision has a positive effect on the reliability of presentation of financial statements is accepted so that the hypothesis can be accepted and is supported by empirical evidence. Acceptance or proof of this third hypothesis simultaneously answers the research question.

Keywords: *Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology, Regional Financial Supervision, Reliability of Presentation of Financial Statements*

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mardiasmo, 2004).



Mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, yaitu pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Menanggapi paradigma baru tersebut, pemerintah memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah (Mardiasmo, 2004).

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal. Keandalan informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 yang secara khusus menggunakan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja pemerintah, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam laporan keuangan dituntut keandalan. Dengan demikian, adanya kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pemberian informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas keputusan baik bagi pemakai internal maupun pemakai eksternal. Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Informasi mungkin saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka kegunaan informasi tersebut dapat menyesatkan.

Kualitas Informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, ditambah pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu dan memperlancar proses keandalan pelaporan keuangan daerah, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

Teknologi informasi selain teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal sehingga akan mempengaruhi keandalan penyajian laporan keuangan daerah.

Hal lain yang mungkin mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No.74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam

pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

STUDI LITERATUR

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: Aset; Kewajiban; dan Ekuitas dana.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/daerah.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna. Oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2008).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang

relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), yaitu Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), yaitu Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini
3. Tepat waktu, yaitu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap, yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Jujur, artinya Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat Diverifikasi (verifiability), artinya Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas, artinya informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan karakteristik kualitas laporan keuangan daerah diatas, peneliti mengambil indikator untuk kualitas laporan keuangan daerah, yaitu (1) relevan, yang digambarkan dengan informasi keuangan dapat menggambarkan kondisi masa lalu dan masa yang akan datang serta ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan, (2) andal, yang digambarkan dengan laporan keuangan daerah dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan juga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan disajikan dengan wajar dan jujur, (3) dapat Dibandingkan, digambarkan dengan laporan keuangan daerah tahun berjalan dapat dibandingkan laporan keuangan daerah periode sebelumnya, dan (4) dapat dipahami, digambarkan dengan informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca dan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat

mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk katagori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, seksesi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan SDM.

Menurut Mangkunegara (2011) menyatakan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

Menurut Spencer & Spencer dalam Moehersono (2014) mengartikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individual dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu.

Dalam Matindas (2013) dikemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan satu kesatuan tenaga manusia dalam sebuah organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia dapat diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai”.

Disisi lain, kompetensi sumber daya manusia menurut Wirawan (2009) mendefinisikan karakteristik pengetahuan, keterampilan, prilaku dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan potensial yang terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan fungsi jabatan berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

2.6 Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia

Komponensi sumber daya manusia merupakan salah satu hal utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Boyatzis dalam Sudarmanto (2015) terdapat 5 (lima) komponen kompetensi terdiri dari:

- a. Motive (dorongan); perhatian berulang terhadap pernyataan tujuan, atau kondisi, yang muncul dalam bayangan yang mendorong, memerintahkan atau menyeleksi perilaku individu.
- b. Traits (ciri, sifat, karakter pembawaan) merupakan pemikiran-pemikiran dan aktivitas psikomotorik yang berhubungan dengan kategori umum dari kejadian-kejadian.
- c. Self image (citra diri), merupakan persepsi orang terhadap dirinya dan evaluasi terhadap citranya tersebut.
- d. Social role (peran sosial), merupakan persepsi orang terhadap seperangkat norma sosial perilaku yang diterima dan dihargai oleh kelompok sosial atau organisasi yang dimilikinya.
- e. Skills (keterampilan), merupakan kemampuan yang menunjukkan sistem atau urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja.”

Menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2015) mengemukakan komponen kompetensi seagai berikut:

1. Motives (motif) adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki seseorang yang menyebabkan tindakan. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan dan tujuan tertentu dan menjauh dari yang lain.
2. Traits (sifat), adalah karakteristik-karakteristik fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Self-concept (konsep diri), adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang
4. Knowledge (pengetahuan), adalah pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang spesifik tertentu.
5. Skill (keterampilan), adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen kompetensi sumber daya manusia terdiri atas motif, sifat, konsep atau citra diri, peran social, pengetahuan, dan juga keterampilan. Menurut Spencer & Spencer yang dikutip oleh Sudarmanto (2015), keterampilan dan

pengetahuan sifatnya dapat dilihat dan mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan citra diri, watak, motif sifatnya tidak tampak dan lebih sulit untuk dikembangkan melalui program pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia.

METODE

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan- hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi lainnya (Sugiyono, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan daerah pada OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu responden dengan kriteria Sekretaris/Kabid, Kasubag keuangan dan bendahara.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dan dikumpulkan melalui pemberian pernyataan kepada responden melalui penyebaran kuisioner. Menurut [Sugiyono \(2018:142\)](#) kuisioner merupakan cara untuk memperoleh data melalui pemberian pertanyaan atau pernyataan pada responden. Setiap jawaban yang diberikan oleh responden kemudian diukur menggunakan skala *likert* yang merupakan alat ukur atas pendapat individu atau kelompok orang mengenai fenomena sosial. Dalam hal ini, fenomena yang dimaksud ialah variabel yang dipilih secara spesifik oleh peneliti..([Sugiyono 2018:93](#))

HASIL

Uji Model Penelitian dan Kelayakan Model penelitian

Penjelasan yang telah disajikan sebelumnya menyajikan bahwa pengukuran model measurable model dilakukan dengan menguji dan reliabilitas dan menguji validitas konstruk. Reliabilitas instrumen dilihat dari nilai composite reliability dan cronbach's alpha. Validitas instrumen dilihat dari nilai validitas konvergen (convergent validity) dan validitas diskriminan (discriminant validity). Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap data yang diperoleh, nilai composite reliability dan cronbach's alpha disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Nilai composite reliability dan Cronbach's Alpha

Latent Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0.810	0.699
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0.815	0.710
Pengawasan Keuangan Daerah (X3)	0.706	0.500
Keandalan Penyajian Laporan Keuangan (Y)	0.858	0.810

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas komposit untuk semua konstruk (Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Daerah) lebih besar dari 0,70. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa syarat reliabilitas konsistensi

internal dari instrumen penelitian ini yang didasarkan pada parameter reliabilitas komposit telah terpenuhi.

Nilai *cronbach's alpha* yang dihasilkan pada tabel 4.7 di atas lebih besar dari (\geq) 0,70 untuk seluruh konstruk. Dengan demikian syarat reliabilitas konsistensi internal dari masing-masing instrumen penelitian berdasarkan parameter *cronbach's alpha* telah terpenuhi. Hasil ini mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel telah memiliki reliabilitas yang baik. Tingkat reliabilitas yang baik mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara konsisten memberikan hasil yang sama setiap dilakukan pengukuran.

Nilai *average variances extracted (AVE)* yang dihasilkan untuk mengevaluasi validitas konvergen disajikan pada tabel pada tabel 2

Tabel 2
Koefisien Regresi

Hipotesis	p-Values	Koefisien regresi	Keputusan
H1	<,01	0,28	Diterima
H2	0,07	0,13	Diterima
H3	0,03	0,17	Diterima
H4	0,09	0,12	Diterima

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil pengujian yang telah dilakukan untuk menguji beberapa indikator (parameter) model *fit* yang lain seperti: *Average path coefficient (APC)*, *Average R-squared (ARS)*, *Average adjusted R-squared (AARS)*, *Average block VIF (AVIF)* dan *Average full collinearity VIF (AFVIF)* disajikan dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Indikator Model Fit

Parameter	Nilai	Batasan	Kesimpulan
<i>Average path coefficient (APC)</i>	0.117 P=0.013	$p < 0,05$	Model fit
<i>Average R-squared (ARS)</i>	0.169 P<0.015	$p < 0,05$	Model fit
<i>Average adjusted R-squared (AARS)</i>	0.139 P<0.032	$p < 0,05$	Model fit
<i>Average block VIF (AVIF)</i>	1.228	acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	Model fit
<i>Average full collinearity VIF (AFVIF)</i>	1,117	acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	Model fit
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	0.321	small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36	Model fit

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria *goodness of fit* model dalam penelitian ini telah terpenuhi. APC, ARS dan AARS yang digunakan untuk mengukur rata-rata nilai path koefisien, R-square dan adjusted R-square menghasilkan nilai APC = 0,117; ARS = 0,169; dan AARS = 0,139 dan semua nilai tersebut signifikan pada level $< 0,001$ P value yang direkomendasikan untuk APC, ARS dan AARS sebagai model fit adalah 0,05 ((Kock, 2015; Latan dan Ghazali, 2016b). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini fit. Hasil ini juga didukung oleh AVIF dan AFVIF yang digunakan sebagai indikator untuk melihat terjadi atau

tidak terjadinya *multicollinearities*. Nilai yang dihasilkan untuk masing-masing AVIF dan AFVIF sebesar 1.228 dan 0.321. Nilai ini berada dibawah 5 (lebih kecil dari 5) atau berada dibawah 3,3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi kriteria dan tidak ada masalah *multicollinearities* antar indikator dan antar variabel eksogen.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian full model persamaan struktural (inner model) yang mencakup variabel *Peer Influence*, *Outcome Expectancies*, Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan, dan Sistem Pengendalian Internal sebagai mana yang disajikan di atas akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab hipotesis penelitian. Hasil uji hipotesis dan kesimpulan atas diterima atau ditolaknya hipotesis yang didasarkan pada arah hubungan (koefisien yang dihasilkan) dan tingkat probabilitas yang dihasilkan akan dibahas pada bahasan berikut ini.

Hipotesis Pertama, Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan

Penelitian ini menemukan adanya pengaruh signifikan Kualitas Sumber daya manusia terhadap keandalan penyajian laporan keuangan. Hasil uji terhadap parameter antara kualitas sumber daya manusia dengan Keandalan penyajian laporan keuangan seperti yang ditunjukkan pada output model persamaan struktural menunjukkan adanya pengaruh yang positif diantara kedua variabel tersebut. Nilai koefisien yang dihasilkan dalam pengaruh antara kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan penyajian laporan keuangan sebesar 0,28 dan dengan nilai p yang dihasilkan sebesar $<0,01$ signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$. Hal ini menunjukkan hipotesis 1 di terima

Hipotesis Kedua, Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan

Hipotesis kedua menemukan adanya pengaruh signifikan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan. Hasil menunjukkan adanya pengaruh yang Positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien yang dihasilkan yaitu sebesar 0,13 dan dengan nilai p yang dihasilkan sebesar 0,07 yang signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$. Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis 2 terbukti dan diterima

Hipotesis Ketiga, Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan dengan. Hasil menunjukkan adanya pengaruh yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien yang dihasilkan dalam hubungan Pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan penyajian laporan keuangan dengan nilai hasil pengujian sebesar 0,17 dan dengan nilai p yang dihasilkan sebesar 0,03 yang signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$. Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengawasan sistem keuangan berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan sehingga penelitian ini dapat diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan Penyajian laporan keuangan diterima dan didukung oleh bukti empiris. Diterimanya atau dengan terbuktinya hipotesis pertama ini sekaligus menjawab pertanyaan penelitian pertama.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan diterima. Diterimanya atau dengan terbuktinya hipotesis kedua ini, maka hal ini sekaligus menjawab pertanyaan penelitian kedua.
3. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan

keuangan diterima sehingga hipotesis dapat diterima dan didukung oleh bukti empiris. Diterimanya atau dengan terbuktinya hipotesis ketiga ini sekaligus menjawab pertanyaan penelitian

REFERENSI

- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ariesta, Fadila. 2013. Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta.
- Celviana dan Rahmawati (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten). Simposium Nasional Akuntansi 13. Purwokerto.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005. BPFE, Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. BPFE. Yogyakarta.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
- Lismawati. 2012. Pengaruh Kemampuan Sumber daya Manusia terhadap Keterandalan dan ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan. Volume 04 No. 04 Juli-Desember
- Sari, Shinta Permata, dan Banu Witono. 2014. Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sancall. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sekaran, Uma. 2003. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.
- Sembiring, Febriady Leonard. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.